

PENERAPAN SIKAP ANTI KORUPSI DI ERA GLOBALISASI BAGI GENERASI MILENIAL DAN Z

Anggun Aura Salsabilla *¹
Eva Yuyun Vahira ²
M. Zaky Alfauzi ³
Radea Mare Syaharani ⁴
Rahma Sulistyarningsih ⁵
Vio Ayu Agustin Simatupang ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail : Anggunaurasalsabilla230205186@student.umri.ac.id¹,
Evayuyunvahira230205208@student.umri.ac.id², M.zakyalfauzi230205194@student.umri.ac.id³,
Radeamaresyaharani230205191@student.umri.ac.id⁴,
Rahmasulistyarningsih230205192@student.umri.ac.id⁵,
Vioayuagustinsimatupang230205198@student.umri.ac.id⁶

Abstrak

Korupsi merupakan masalah global yang telah ada sejak peradaban awal, termasuk di Indonesia, dan berdampak buruk pada berbagai sektor kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pendidikan karakter anti-korupsi dalam membangun kesadaran moral generasi muda di era globalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka yang sistematis. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan karakter anti-korupsi efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, yang menjadi dasar penting dalam mencegah tindakan koruptif. Implementasi pendidikan ini melibatkan tiga pilar utama, yaitu keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Keluarga berperan dalam memberikan teladan integritas.

Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan karakter, Anti-korupsi, Generasi muda, Era globalisasi

Abstract

Corruption is a global issue that has existed since ancient civilizations, including in Indonesia, and has negatively impacted various sectors of life. This study aims to identify the role of anti-corruption character education in fostering the moral awareness of young generations in the era of globalization. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through systematic literature reviews. The findings indicate that anti-corruption character education effectively instills moral values such as honesty, responsibility, and empathy, which serve as essential foundations for preventing corrupt practices. The implementation of this education involves three main pillars: family, educational institutions, and society. Families play a crucial role in providing examples of integrity.

Keywords : Corruption, Character education, Anti-corruption, Young generation, Globalization era

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah yang telah menghantui peradaban manusia sejak awal munculnya sistem pemerintahan (Hussein Alatas, 1975). Salah satu bukti tertua dari praktik ini tercatat pada masa kekaisaran Romawi, sebuah era yang dikenal sebagai salah satu pilar sejarah peradaban Barat. Pada masa itu, korupsi sering kali terjadi di berbagai lapisan pemerintahan, mulai dari pejabat rendah hingga tingkat tertinggi (Hussein Alatas, 1975). Para pejabat sering menerima suap dalam bentuk uang, barang, atau jasa, sebagai ketidakseimbangan untuk memberikan layanan tertentu atau membuat keputusan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Misalnya, suap digunakan untuk memenangkan kontrak bisnis, menghindari hukuman, atau mendapatkan jabatan penting di pemerintahan. Korupsi di kekaisaran Romawi tidak hanya menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetapi juga melibatkan struktur kekuasaan negara yang bergantung pada loyalitas rakyatnya.

Pada masa itu, salah satu faktor utama yang memicu korupsi adalah kurangnya pengawasan terhadap para pemegang kekuasaan. Tidak adanya transparansi mekanisme atau lembaga yang mengawasi otoritas berwenang membuat banyak pejabat merasa leluasa untuk

memperkaya diri sendiri (Capri et al., 2021). Kekuasaan yang tidak terbatas dan sifat hierarki dalam struktur pemerintahan juga menciptakan peluang besar untuk praktik-praktik koruptif. Dalam jangka panjang, korupsi ini turut berkontribusi pada kemunduran kekaisaran Romawi, karena mengurangi efisiensi pemerintahan, meningkatkan penurunan sosial, dan meningkatkan moralitas di antara pemimpin dan rakyat. Hal ini menjadi pelajaran berharga bahwa tanpa sistem pengawasan yang baik, kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh individu-individu yang seharusnya melayani kepentingan umum.

Korupsi di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam sejarah negara ini, telah menjadi masalah yang terus berkembang dan meluas sejak era kolonial Belanda (Zakariya et al., 2021). Pada abad ke-19, sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Jawa dan wilayah sekitarnya, merupakan salah satu bentuk eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada. Dalam sistem ini, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditas tertentu, seperti kopi, tebu, dan nila, yang kemudian dijual ke pasar internasional dengan harga yang sangat rendah. Keuntungan dari komoditas penjualan ini sebagian besar dinikmati oleh segelintir pihak, terutama para pejabat kolonial dan perusahaan Belanda, sementara rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras tanpa ketidakseimbangan yang layak. Korupsi dalam bentuk manipulasi sumber daya ini tidak hanya merugikan rakyat Indonesia tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam, di mana kekayaan dan kesejahteraan hanya menerangi beberapa orang yang berkuasa. Praktik-praktik korupsi yang terjadi pada masa kolonial ini membentuk pola perilaku yang akhirnya menjadi

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, meskipun pemerintah berusaha membangun sistem yang lebih adil dan transparan, praktik korupsi tetap berkembang, terutama selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, korupsi semakin merajalela dan terstruktur dengan baik, dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah dan kalangan pengusaha yang terlibat dalam berbagai bentuk otoritas yang berwenang. Winarno (2017) dalam penelitiannya mencatat bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah endemik, dengan berbagai sektor pemerintahan, mulai dari lembaga legislatif hingga lembaga yudikatif, terlibat dalam praktik ini. Pada masa Orde Baru, praktik korupsi tidak hanya terbatas pada suap atau pemerasan, tetapi juga mencakup penggelapan anggaran negara, perencanaan proyek yang tidak transparan, serta pemberian izin dan kontrak yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Di era globalisasi yang semakin pesat, korupsi tidak hanya semakin kompleks, namun juga semakin sulit untuk dilacak dan diberantas (Winarno, 2017). Perkembangan teknologi modern, seperti blockchain dan cryptocurrency, menciptakan peluang baru bagi para pelaku korupsi untuk menyembunyikan jejak mereka dengan lebih efektif. Teknologi ini, yang awalnya diciptakan untuk tujuan yang sah dan transparan, kini juga digunakan untuk mengalihkan dana, mencuci uang, dan bahkan untuk transaksi suap antar negara tanpa terdeteksi. Sahabuddin (2024) mengungkapkan bahwa globalisasi tidak hanya membuka akses informasi yang lebih luas, tetapi juga memberi ruang bagi praktik korupsi lintas batas negara. Pelaku korupsi kini dapat dengan mudah memindahkan aset mereka ke luar negeri, menghindari pengawasan nasional, dan memanfaatkan kelemahan hukum di negara tertentu untuk melindungi diri mereka dari penegakan hukum yang efektif. Dengan adanya fenomena ini, tantangan pemberantasan korupsi semakin besar dan memerlukan strategi yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi untuk mempelajari praktik-praktik ilegal yang semakin canggih.

Di Indonesia, meskipun beberapa kemajuan telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, tantangan besar masih tetap ada. Pada tahun 2023, Transparency International memberikan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sebesar 38, yang menandakan bahwa negara ini masih menghadapi masalah korupsi yang serius dan mendalam (Transparency International the global coalition against corruption, 2023). Skor ini mencerminkan kenyataan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya diajarkan pada praktik-praktik pengawetan yang diberi wewenang oleh para pejabat, tetapi juga merupakan bagian dari budaya patronase dan nepotisme yang sudah mengakar kuat dalam sistem sosial dan politik negara. Praktik ini menyebabkan penempatan orang-orang yang tidak memenuhi syarat dalam posisi strategis hanya berdasarkan kedekatan dengan pihak yang berkuasa, yang pada keberlanjutan kondisi sistem pemerintahan yang tidak

efisien dan tidak transparan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering kali para pelaku korupsi dapat lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak orang yang memandang korupsi sebagai hal yang sudah biasa dan tidak merasa bahwa tindakan tersebut memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bangsa dan negara (Friedman & Karunia, 2022).

Pendidikan anti-korupsi menjadi solusi yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan ini. Pendidikan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi, tetapi juga untuk membangun karakter dan integritas generasi muda yang kuat (Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, 2024). Generasi muda adalah kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, karena mereka akan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan. Sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Tambang oleh penulis dan tim menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi dapat diterapkan dalam skala lokal dengan cara yang menyenangkan dan mendalam. Melalui diskusi interaktif, simulasi kasus, dan kuis, siswa diajak untuk memahami bahwa korupsi bukan hanya merupakan kejahatan besar yang merugikan negara, tetapi juga bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil, seperti menyontek atau mengambil hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, pendidikan anti-korupsi berperan sebagai alat untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga dapat menciptakan budaya yang lebih jujur dan bertanggung jawab di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada era atau wilayah tertentu. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai peradaban dunia sepanjang sejarah, mulai dari pemerintahan kuno hingga modern. Korupsi kerap berkembang dalam sistem yang memiliki celah hukum, rendahnya transparansi, atau ketika nilai-nilai moral masyarakat mulai terdegradasi. Selain itu, korupsi sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi di suatu negara, di mana kekuasaan dan kekayaan cenderung menyukai segelintir orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi makna yang melekat pada data, tanpa terikat pada angka-angka statistik (Sugiyono, 2006). Metode deskriptif-analitis menekankan pada penggambaran fenomena secara rinci dan menganalisis hubungan antar elemen yang ditemukan. Metode ini dipilih untuk menggali dan menganalisis data yang relevan dengan penerapan pendidikan karakter anti-korupsi di era globalisasi. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi peran pendidikan dalam membangun kesadaran dan integritas generasi muda terhadap ancaman korupsi yang semakin kompleks.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu metode yang melibatkan penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi (Zed, 2001). Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan empiris yang relevan dengan pendidikan karakter anti-korupsi pada era globalisasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter anti-korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran moral generasi muda di era globalisasi. Generasi milenial dan Z, yang tumbuh dalam lingkungan dengan akses teknologi dan informasi yang sangat luas, dihadapkan pada tantangan moral yang kompleks, termasuk godaan korupsi yang semakin terstruktur dan sulit dideteksi. Salah satu temuan utama adalah bahwa pendidikan karakter mampu menginternalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati ke dalam diri individu. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting bagi generasi muda untuk memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat secara luas. Dengan memahami konsep ini, mereka tidak hanya lebih kritis dalam menghadapi situasi yang berpotensi korup, tetapi juga

termotivasi untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam mencegah praktik-praktik koruptif. Dalam konteks globalisasi, kemampuan untuk mengenali, menganalisis, dan mencegah tindakan korupsi menjadi keterampilan yang esensial bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia modern yang semakin kompleks.

Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi pendidikan karakter anti-korupsi. Pendidikan ini tidak hanya melibatkan satu ranah, tetapi mencakup tiga pilar utama, yaitu keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, peran orang tua sangat dominan dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Orang tua yang secara konsisten menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan menghormati norma-norma sosial akan menjadi panutan yang kuat bagi anak-anak mereka. Keteladanan ini akan membantu membentuk fondasi karakter yang kokoh, yang pada akhirnya akan mencegah individu terjerumus dalam praktik korupsi (David et al., 2023).

Di institusi pendidikan, program pendidikan anti-korupsi harus terintegrasi dengan kurikulum formal dan non-formal. Dalam pembelajaran formal, pengenalan konsep-konsep dasar tentang korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diajarkan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi, dan Etika. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti simulasi kasus, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi isu-isu terkait korupsi secara mendalam dan mengembangkan solusi inovatif. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Sebagai bagian dari implementasi, kami dan tim peneliti secara langsung terlibat dalam kampanye anti-korupsi melalui program sosialisasi di SMPN 4 Tambang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosialisasi ini, kami menggunakan metode diskusi interaktif dan simulasi kasus untuk menggambarkan dampak negatif korupsi secara nyata. Para siswa diajak untuk mengenali contoh-contoh sederhana dari perilaku koruptif yang sering diabaikan, seperti menyontek, mengambil hak orang lain, atau tidak menghormati aturan yang ada. Melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya memahami bahaya korupsi dalam skala besar, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kegiatan ini mendapat respons yang sangat positif dari para siswa dan guru, yang mengakui bahwa pendekatan berbasis praktik dan interaksi langsung jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter anti-korupsi (Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, 2021). Komunitas lokal dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan mengorganisir kegiatan yang mempromosikan integritas, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye anti-korupsi. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat dapat memperkuat budaya anti-korupsi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Selain itu, media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif secara luas, sehingga memotivasi lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam gerakan anti-korupsi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam pendidikan anti-korupsi, terutama bagi generasi milenial dan Z yang sangat akrab dengan media digital (Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, 2021). Platform pembelajaran online, aplikasi mobile, permainan edukatif, dan kampanye media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan anti-korupsi secara kreatif dan menarik. Misalnya, aplikasi interaktif yang mengajak pengguna untuk menyelesaikan skenario terkait korupsi atau video animasi yang menjelaskan dampak korupsi secara sederhana namun mendalam, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan anti-korupsi, tetapi juga memungkinkan penyebaran pesan-pesan positif secara luas dan efisien. Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan karakter anti-korupsi juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sumber daya dan tingkat komitmen di berbagai wilayah. Ketimpangan ini sering kali mengakibatkan hasil yang tidak merata dalam penerapan program pendidikan. Selain

itu, resistensi budaya terhadap perubahan nilai-nilai tradisional juga menjadi hambatan signifikan. Di beberapa komunitas, praktik-praktik yang dianggap sebagai "budaya lokal" sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip anti-korupsi, sehingga sulit untuk mengubah persepsi masyarakat.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan pendidikan karakter anti-korupsi sangat bergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat. Dengan komitmen yang kuat dari keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat, generasi milenial dan Z memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian program pendidikan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tetap relevan dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Pendidikan karakter anti-korupsi harus terus dikembangkan sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter anti-korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran moral generasi muda di era globalisasi. Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati menjadi landasan utama untuk mencegah generasi di Indonesia terjerumus dalam perilaku koruptif. Pendidikan ini tidak hanya membantu individu mengenali dan menghindari praktik korupsi, tetapi juga memotivasi mereka untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Capri, W., Dhian Cahyati, D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121–142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>
- David, M., Arifin, Z., & Romadhoni, D. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Friedman, L. M., & Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori. *Jurnal UNS*, 1–17. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/downloadSuppFile/62831/9977>
- Hussein Alatas, S. (1975). Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. In *Lpes* (pp. 1–43).
- Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabuddin, M. M. (2024). *Membangun Karakter Anti-Korupsi Menggali Potensi Generasi Milenial dan Z Menuju Masyarakat Integritas* (M. M. Ismamudi, S.E. (ed.); 1st ed., Vol. 1). Widina Media Utama.
- Setia Darma Tri Sinurya, Widodo, S. P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 129.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta. CV*. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono
- Transparency International the global coalition against corruption. (2023). *Corruption Perceptions Index In Indonesia*. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Winarno, R. (2017). Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global. *Lex Publica*, 4(1), 657–678. <https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.657-678>
- Zakariya, R., Syuraida, H., Suyatmiko, W. H., Suraji, Simpson, S. S., Sekretariat Kabinet, Santota, I., Rose-Ackerman, S., Palifka, B. J., Rifa'i, B., Rauf, R., Maulidah, S., Pandeglang Satu Data, Neuman, L. W., Mustofa, M., Moonti, R. M., Kadir, Y., Mahriadi, N., Agustang, A., ... Ramadhana, K. (2021). Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya. In *Merdeka.Com* (Vol. 6, Issue 2, pp. 230–238). https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Pemantauan_Tren_Penindakan_Semester_I_2021.pdf%0Ahttps://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-

pintar-dana-desa.pdf%0Ahttps://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korupsi-dana-desa-kades-sodong-pand

Zed. (2001). *Metode Penelitian Kepustakaan*. : Yayasan Obor Indonesia.